



## Minta Kasus RS Sumber Waras Ditangani PPATK

### Balai Kota, Warta Kota

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.

Pansus ini akan menyelidiki permasalahan pembelian lahan seluas 3,64 hektar yang sedianya akan dibangun Rumah Sakit Khusus Kanker. Pansus juga akan mendalami hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebutkan, pembelian lahan itu teridikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Dimintai tanggapan soal dibentuknya Pansus LHP RS Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), malah meminta agar kasus ini ditangani oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Salahnya di mana. Jangan mengalihkan persoalan. Saya marah sama BPK. Kalau ada temuan, tanya *dong* sama kita. Sekarang salah prosedur di mana? BPK mengatakan NJOP-nya harus lebih murah. Pertanyaan saya, di Tomang kalau harganya lebih murah bisa *nggak* beli tanah dengan harga di bawah NJOP. Yang menentukan NJOP, zonasi, itu Menteri Keuangan," kata Ahok, di Balai Kota, Rabu (12/8).

Ahok menegaskan, pihaknya membeli lahan sesuai NJOP, itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Ahok malah mempertanyakan, kenapa BPK memperlakukan pembelian lahan yang sesuai NJOP. Ahok menjelaskan, kalau soal orang menerima komisi karena menjual NJOP bisa lebih murah dari itu, suruh PPATK selidiki itu. Ahok menegaskan, dirinya

mewajibkan semua transaksi nontunai.

"Jadi, kalau mau audit orang, lihat itikadnya, karakternya. Saya berani *nantang kok*. Periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup. Berani *nggak* pejabat BPK kayak begitu. Berani *nggak* DPRD *ngomong gitu?*" tegas Ahok.

### Hemat

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menambahkan, seluruh proses pembelian lahan pada RS Sumber Waras sudah sesuai dengan ketentuan. Bahkan, Heru memastikan, dalam pembelian lahan tersebut bisa menghemat hingga puluhan miliar. "Kami bisa menghemat Rp 52 miliar," kata Heru.

Heru menjelaskan, pihaknya membeli lahan tersebut dengan biaya yang telah dianggarkan sebesar Rp 800 miliar. Namun, Pemprov DKI Jakarta hanya hanya membayar sebesar Rp 717 miliar. Karena, penjual menanggung biaya 5 persen BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), biaya sertifikat, dan biaya notaris.

"Saya tekankan, yaitu zona lahan yang dimasalahkan ini tidak terkait dengan akses jalan dan segala macam. Kalau satu zona ya .. satu zona, tidak ada urusan dengan Jalan Kyai Tapa atau Jalan Tomang," jelas Heru. "Contohnya, zona kawasan Menteng. Meskipun ada area kumuh, tapi masih merupakan zona kawasan Menteng. Apakah aksesnya di pinggir kali atau bukan, yang namanya zona, walaupun dibelah lima atau enam, tetap menjaga di satu zona," ungkap Heru, Rabu (12/8). (suf)